

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM-SILUHTAN) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DEKONSENTRASI PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Yohanis Sallolo<sup>1</sup>, Sofjan Aripin<sup>2</sup>, Djoko Raharjo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Terbuka  
UPPBJ Tarakan, Indonesia  
sallolo.y@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Terbuka  
Tangerang Selatan, Indonesia  
sofjan.y@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Terbuka  
Tangerang Selatan, Indonesia  
raharjo@ecampus.ut.ac.id

## ABSTRACT

*This study examines the implementation of SIM-Siluhtan in the agricultural extension deconcentration program in North Kalimantan province. The research was conducted in three districts, Bulungan, Nunukan, Malinau using data from 2018- 2019 to describe and analyze SIM-Siluhtan implementation policies in the implementation of the deconcentration program activities, as well as the factors that support and hinder the implementation and the effort made in implementing. This study uses a descriptive qualitative method based on Edward III's theory to describe and explore the fact that the implementation of public policy can be effective, depending on the four factors that influence its success, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.*

*The results showed that overall the stage of the SIM-Siluhtan implementation process with a span of control involving the provincial, district, and subdistrict /BPP levels was successful in achieving the performance target and prioritizing the principles of transparency and publication in the policy implementation which is intensive with support of human resource capabilities of the implementer in carrying out their duties and authorities so that collaboration and communication are build-out which supported by the publication of media communication, namely Facebook, WhatsApp, as well as adequate budgeted support and infrastructure although not maximized due to technical constraints in the field.*

**Keywords:** SIM-Siluhtan Implementation, Communication, Resource, Disposition, Bureaucratic Structure.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi SIM-Siluhtan dalam program dekonsentrasi penyuluhan pertanian di provinsi Kalimantan Utara. Penelitian dilakukan di tiga kabupaten yaitu Bulungan, Nunukan, dan Malinau menggunakan data tahun 2018-2019 dalam mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan implementasi SIM-Siluhtan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi dan juga usaha-usaha yang dilakukan dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan berlandaskan pada teori Edward III untuk menggambarkan dan menggali kenyataan-kenyataan yang terjadi bahwa Implementasi kebijakan publik dapat berjalan efektif, tergantung dari empat faktor yang mempengaruhi keberhasilannya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan secara menyeluruh, tahapan proses implementasi SIM-Siluhtan dengan rentang kendali yang melibatkan level provinsi, kabupaten, dan kecamatan/BPP adalah berhasil mencapai target kinerja dan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan publikasi dalam proses implementasi kebijakan serta pendekatan, koordinasi, dan komunikasi yang intensif dengan dukungan kemampuan SDM para implementor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga terbangun kolaborasi dan komunikasi yang ditunjang oleh media komunikasi pendukung yaitu facebook, WhatsApp, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai, meskipun belum maksimal karena kendala teknis di lapangan.

**Kata Kunci:** *Implementasi SIM-Siluhtan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi*

## **PENDAHULUAN**

Implementasi kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pelaksanaan program dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian (PDPP) di lingkup Kementerian Pertanian dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMPP) dengan aplikasi "SIM-Siluhtan" yang berpedoman pada Permentan R.I Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2013. Penggunaan aplikasi SIM-Siluhtan dalam pelaporan pelaksanaan PDPP bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan program yang meliputi efektifitas dan efisiensi, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu dan akuntabel.

SIM-Siluhtan dirancang untuk memberikan laporan secara rinci tentang perkembangan sejak pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi berupa Sekolah Lapangan (SL) dan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita (ATSL) pada tahun anggaran berjalan setiap tahunnya yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten dengan lokus pelaksanaan pada wilayah binaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan dalam mencapai input dan output kinerja, dengan kolaborasi unsur pelaksana yang terlibat sesuai dengan peran stakeholder.

Pelaksanaan PDPP pada tahun 2018-2019 di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di tiga Kabupaten dengan penanggung jawab kegiatan pada Dinas yang mengelola urusan pertanian di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, dimana pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui SIM-Siluhtan.

Sebagai provinsi termuda, Provinsi Kalimantan Utara masih banyak memiliki kendala-kendala dalam implementasi aplikasi SIM-Siluhtan, antara lain : keterbatasan jaringan telekomunikasi 2G dan 3G yang belum menjangkau seluruh lokasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, ketersediaan listrik, alokasi anggaran yang belum memadai, manajerial pengelolaan anggaran, dukungan sarana dan prasarana, dan penggunaan SIM-Siluhtan yang tergolong masih awam. Dari sisi dinamika kelompok tani pelaksana PDPP yang belum terukur dengan baik, selain itu perlunya peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian dalam menggunakan media Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai sarana administrasi digital.

Pelaksanaan PDPP di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun-tahun sebelumnya yang mana pelaporan yang masih menggunakan cara manual sehingga dalam perkembangan realisasi dan capaian program tidak dapat dipantau dengan baik secara bulanan, terkait capaian bulanan, capaian keberhasilan program, ukuran keberhasilan program yang belum terukur secara spesifik, kendala-kendala yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan, rentang kendali koordinasi dari pihak pelaksana di tingkat di Kabupaten yang masih manual sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di tingkat pusat dan sebaliknya, serta pelaksanaan kegiatan yang belum terencana dengan baik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, beberapa indikasi masalah yang berkaitan dengan sumber daya, komunikasi, sikap, dan struktur organisasi pengelola PDPP di Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori model kebijakan Edwards III (1980) bahwa dalam proses implementasi kebijakan ada empat faktor yang berpengaruh dalam mendorong dan menghambat implementasi kebijakan, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, beberapa indikasi masalah tersebut, berkaitan dengan faktor-faktor Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berkaitan dengan faktor komunikasi, dalam implementasinya masih ada para implementor di kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan yang belum memahami aplikasi SIM-Siluhtan. Berkaitan dengan sumber daya, kemampuan para implementor untuk bekerja berbasis internet yang masih awam bagi petugas admin ditingkat BPP sehingga merasa sulit menggunakan aplikasi ini, serta masih ada implementor yang belum memiliki peralatan kerja memadai seperti laptop, handphone berbasis android, serta masih ada kantor BPP yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi 2G dan 3G di tiga kabupaten. Faktor lainnya terkait disposisi yaitu respon para pelaksana kegiatan PDPP terhadap transformasi administrasi manual ke digital. Selain itu terkait struktur birokrasi, rentang kendali pengelolaan PDPP yang melibatkan stakeholder level provinsi, kabupaten, dan kecamatan/ BPP pelaksana kegiatan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melaksanakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan sistem informasi SIMSIHULTAN dalam program dekonsentrasi penyuluhan pertanian di Provinsi Kalimantan Utara.

## **Tinjauan Pustaka**

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Menurut Edwards III (1980:1) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. George C. Edwards III berpandangan bahwa Implementasi kebijakan publik dapat berjalan efektif, tergantung dari 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Keempat faktor implementasi tersebut dipandang krusial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu faktor, maka tiga faktor lainnya akan terpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik.

## **Komunikasi**

Menurut Agustino (2008: 157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Menurut Edward III dalam Hayat (2018:131-132), menyatakan bahwa proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Di era teknologi informasi ini, berbagai jenis media aplikasi komunikasi berbasis teknologi android saat ini telah dikembangkan oleh berbagai *platform* yang berbasis jaringan internet publik, antara lain whatsapp, facebook, instagram, twitter. Hal ini telah banyak mempercepat pertukaran informasi antar komunikasikan sehingga turut berpengaruh pada implementasi kebijakan SIM-Siluhan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

## **Sumber Daya**

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edwards III (Widodo, 2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Selanjutnya dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam kutipan "*probably the most essential resources in implementing polict is staff*".

Hayat (2014:33-34), mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur berpengaruh terhadap kinerja pelayanan yang diberikan, atas dasar kemampuan dan kualitas yang dimilikinya berdampak terhadap kinerja yang dilakukan. Begitu juga dengan aspek kemampuan dan tanggung jawab yang diemban oleh aparatur pelayanan harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, sehingga implementasi kebijakan berdampak positif terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya dikatakan bahwa pelayanan yang baik ditentukan oleh sumber daya yang berkualitas sedangkan kualitas pelayanan akan berdampak secara melembaga, sehingga itulah yang menjadi indikator penilaian bagi masyarakat terhadap penilaian kinerja pelayanan secara objektif dan komprehensif.

## **Disposisi**

Menurut Edwards III dalam Hayat, (2018:129), disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Kebijakan implementasi SIM-Siluhtan dalam pelaksanaan PDPP di wilayah provinsi Kalimantan Utara yang diterapkan oleh pemerintah dilevel pusat hingga BPP sejak tahun 2017, dan para implementor dituntut untuk mampu mengimplementasikan kebijakan ini dengan target yang ditentukan. Komitmen para implementor memegang peranan yang sangat penting untuk mensukseskan kebijakan ini.

### Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam Widodo, (2010 : 106), struktur birokrasi sangat penting karena implementasi bisa jadi masih belum efektif karena ketidak-efisienan dan tidak efektifnya struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

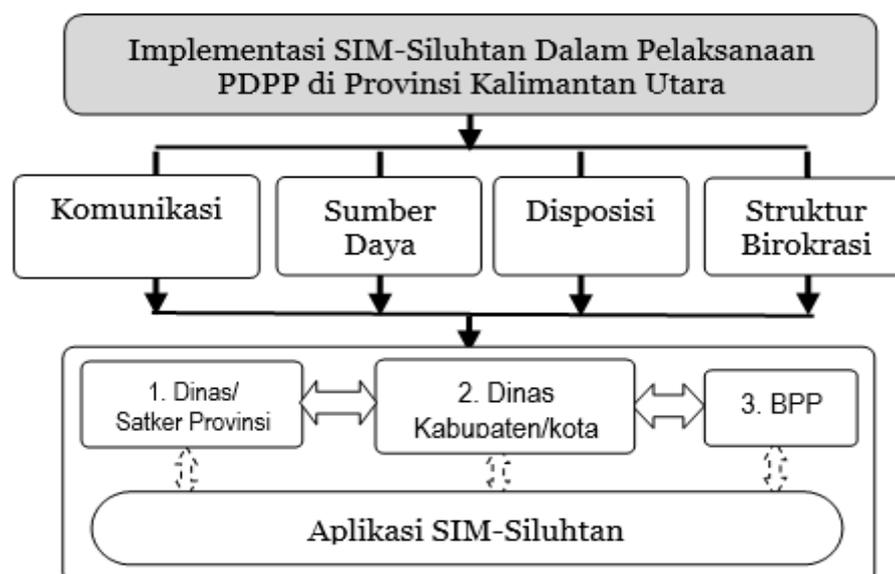
SOP yang tidak tersedia sebagai sebuah tuntutan birokrasi dapat menyebabkan sebuah kendala dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Edwards III dalam Budi Winarno, (2005:152) menjelaskan bahwa “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

Selain SOP, fragmentasi merupakan faktor yang menentukan dalam struktur birokrasi. Menurut Edwards III dalam Budi Winarno, (2005:155) “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Selanjutnya dikatakan bahwa Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar-red) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk intruksi terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

### KERANGKA BERPIKIR

Dalam menganalisis implementasi SIM-Siluhtan sebagai bentuk implementasi dari Permentan Nomor : 16/Permentan/ OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di lingkungan Kementan R.I. Dalam pelaksanaan PDPP di provinsi Kaltara, dimana dalam penelitian ini difokuskan pada empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dalam gambar 1 berikut ini.

**GAMBAR 1**  
Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Analisis Penulis, 2022

## **METODE PENELITIAN**

Mengacu pada tujuan penelitian dalam mendeskripsikan kebijakan implementasi SIM-Siluhtan dalam pelaksanaan PDPP di Provinsi Kaltara, perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang menggambarkan dan sekaligus menggali kenyataan-kenyataan yang belum terungkap selama ini yang kemudian dijelaskan dan diterapkan sehingga diketahui gambaran yang sebenarnya. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIM-Siluhtan sebagai media sistem informasi yang berkolaborasi dengan para implementor di ditingkat provinsi dan kabupaten (Nunukan, Malinau, dan Bulungan) dalam pelaksanaan program dekonsentrasi, dan faktor apa saja yang menunjang dan menghambat, serta untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan dalam implementasinya yang ditinjau dari aspek proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang di analisis berdasarkan teori Edwards III yaitu ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu-sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2008:174).

## **INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA**

Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2019. Instrumen yang digunakan yaitu mengumpulkan bahan penelitian yang telah dipublikasikan melalui aplikasi SIM-Siluhtan tahun 2018 dan 2019, dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur pada saat peneliti melakukan sosialisasi PDPP yang diintegrasikan dengan implementasi aplikasi SIM-Siluhtan di Kabupaten Nunukan, Bulungan, dan Malinau, serta melalui angket penelitian.

Informan sebagai sumber data dan informasi yang berperan selaku implementor SIM-Siluhtan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan peran keterlibatan individu dalam pelaksanaan PDPP tahun 2019, terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan petugas administrasi pada Satker dekonsentrasi provinsi, Penanggung jawab (PJW) Kegiatan dan PJW Pelaporan, serta Koordinator dan petugas admin aplikasi SIM-Siluhtan tingkat kabupaten dan BPP.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kegiatan PDPP di Provinsi Kaltara tahun 2018 – 2019**

Program kegiatan PDPP di Provinsi Kaltara pada tahun 2018 – 2019 dilaksanakan mengacu pada indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dengan target yaitu : (a) Jumlah Poktan yang menerapkan system pertanian terpadu, (b) Poktan yang meningkat kapasitasnya, dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan (juklak). Pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapangan (SL) dan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita (ATSL) melalui PDPP di Provinsi Kaltara pada tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan berdasarkan pedoman dan ketentuan serta petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh BPPSDMP Kementan RI, dengan pembagian tugas dan peran sebagai Satker Dekonsentrasi PDPP Provinsi, Pelaksana Kabupaten, dan Pelaksana BPP.

Satker Dekonsentrasi PDPP Provinsi bertanggung jawab menyusun Juknis Pelaksanaan Kegiatan yang mengacu pada pedoman umum, POK dan ROK; menjabarkan dan distribusikan rencana pencapaian indikator kinerja PDPP pada tingkat kabupaten/kota/BPP; melakukan advokasi, pengawalan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan PDPP di kabupaten/kota; melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PDPP di kabupaten/kota/kecamatan/BPP.

Pelaksana Kabupaten mengacu kepada Rencana Operasional Kegiatan (ROK), Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis sebagai acuan kerja PDPP di Kabupaten /Kota dan Kecamatan/BPP;

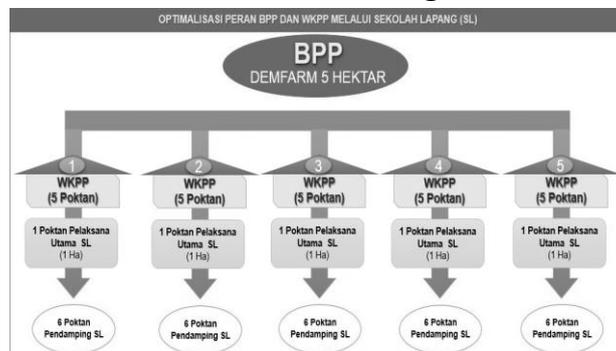
pemantauan, Pelaporan, Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan PDPP di Kabupaten/Kota/BPP. Pelaksana BPP bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PDPP dan anggaran kinerja; menyiapkan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) penerima manfaat kegiatan; melaporkan tahapan pelaksanaan pada SIM-Siluhtan (Tabel 1) .

**Tabel 1.** BPP Pelaksana PDPP di Provinsi Kaltara Tahun 2018 dan 2019

Kabupatn/Kegiatan	BPP Pelaksana Tahun 2018	BPP Pelaksana Tahun 2019
<b>Kabupaten Bulungan</b>		
Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita	Tanjung Palas Timur Tanjung Palas Tengah	Tanjung Selor Tanjung Palas Tanjung Palas Tengah Tanjung Palas Timur Tanjung Palas Utara
Sekolah Lapangan	Tanjung Palas Utara Tanjung Palas Tengah	Tanjung Selor Tanjung Palas Tanjung Palas Tengah Tanjung Palas Timur Tanjung Palas Utara Sekatak
<b>Kabupaten Nunukan</b>		
Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita	Nunukan Nunukan Selatan Sebatik Sebatik barat Sebuku	Tulin Onsoi Nunukan Sei Menggaris Sebatik barat Nunukan Selatan
Sekolah Lapangan	Nunukan Selatan	Sebatik barat Sebatik Nunukan Nunukan Selatan Sebuku Sei Menggaris Lumbis Sembakung
<b>Kabupaten Malinau</b>		
Sekolah Lapangan	Mentarang	Malinau Barat

Sumber : Data sekunder, 2019

**Gambar 1**  
Metode Pelaksanaan Kegiatan SL



Sumber : Pedoman Dekonsentrasi, 2019

**Gambar 2**  
**Metode Pelaksanaan Kegiatan ATSL**



Sumber : Pedoman Dekonsentrasi, 2019

### Deskripsi Objek Penelitian SIM-Siluhtan

SIM-Siluhtan dirancang sebagai sarana pembinaan dan supervisi sesuai jenjang tingkatan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor Nomor 16/Permentan/OT.140/2/ 2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementan R.I. Aplikasi ini berfungsi sebagai media administrasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan PDPP yang meliputi efektifitas dan efisiensi, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu dan akuntabel dan sebagai subyek dalam evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Diera massifnya kebutuhan pemanfaatan TIK, berbagai lembaga berlomba untuk menciptakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai pusat data dan informasi, dari sejumlah aplikasi SIM yang dibuat tidak banyak yang mampu bertahan dalam pemanfaatannya yang disebabkan oleh TIK berkembang begitu cepat menyesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan yang berubah demikian cepat, sehingga bila mana sebuah aplikasi dirancang secara statis maka akan menjadi kendala dalam menyesuaikan dengan arus TIK yang bersifat dinamis. Hal ini sejalan dengan pendapat O'Brien (1996) dalam Wijayanto (2003), didalam penelitian Harsono (2009:59) bahwa di dalam sistem informasi terdapat empat komponen utama yaitu Sumber daya manusia, Sumber daya perangkat keras, Sumber daya perangkat lunak, Data, sedangkan komponen yang paling utama adalah teknologi komputasi dan teknologi informasi.

**Gambar 3**

### Halaman Jenis Laporan Kegiatan PDPP pada Aplikasi SIM-Siluhtan



Sumber : Aplikasi SIM-Siluhtan, 2019

Hasil unggah file laporan oleh para implementor pada setiap tahapan, yang tampil pada menu SIM-Siluhtan dan diketahui oleh seluruh stakeholder terkait, sehingga progres pelaksanaan kegiatan dilapangan dapat termonitor dengan cermat perkembangan dan capaian pelaksanaan kegiatan PDPP dalam lingkup BPP, Kabupaten, dan Provinsi Kaltara tahun anggaran berjalan. File laporan yang telah disediakan didalam sistem sesuai dengan nama (provinsi, kabupaten, BPP) dengan jenis file excel yang telah dimodifikasi menurut kebutuhan

data yang diperlukan, selanjutnya para implementor mengunduh *file* laporan-laporan dan mengisi data-data laporan secara *offline* dan selanjutnya mengunggah kembali file laporan kedalam sistem database SIM-Siluhtan.

## Jaringan Telekomunikasi

Di era teknologi informasi, berbagai jenis media aplikasi komunikasi berbasis teknologi android telah tersedia antara lain *whatsApp*, *facebook* yang mana dengan media ini telah banyak mempercepat pertukaran informasi antar komunitas sehingga turut berpengaruh signifikan pada percepatan capaian target pelaksanaan PDPP di provinsi Kaltara.

Dalam (tabel 2) menunjukkan Jumlah Tower BTS yang terdapat di Provinsi Kaltara mencapai 284 titik yang tersebar di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan. Namun masih ada kantor BPP di wilayah kabupaten yang belum terjangkau jaringan internet.

**Tabel 2.** Layanan Telekomunikasi di Provinsi Kaltara

Kabupaten/Kota	Penyedia layanan telekomunikasi	Jmlh Menara BTS	Desa Terjangkau Telekomunikasi Nirkabel
Malinau	Telekomunikasi Indonesia, Tbk	88	102
Bulungan	PT. Telkomsel	70	67
Nunukan	PT Simpatindo Multi Media	107	223
Tana Tidung	PT. Indosat, Tbk	13	20
Tarakan		131	20

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019

Implementasi SIM-Siluhtan pada PDPP di Provinsi Kaltara dapat terlaksana dengan baik walaupun belum optimal karena ada beberapa kendala terutama dalam mengakses aplikasi. Hal ini disebabkan karena permasalahan jaringan internet, signal hilang-timbul/*spot-spot* atau terbatas di beberapa BPP dan juga masih ada kendala listrik sebagaimana pada tabel 3.

**Tabel 3.** Ketersediaan Signal Internet di Areal Kantor BPP

Kabupaten/BPP	Alamat	Signal Internet
Kabupaten Nunukan		
Nunukan	Jl. Sei Fatimah Nunukan RT.03	Ada
Nunukan Selatan	Jl. Dewi Sartika RT 08 Kel. Tanjung Harapan	Tidak ada
Sei Menggaris	JL P. Antasri Desa Tabur	Ada
Sebuku	Jl, Trans Kaltim Sebuku, Desa Pembeliangan	Ada
Sebatik	Jl.Jend. Sudirman RT. 04	Ada
Sebatik Barat	Jl. Lapio Sebatik Barat Desa Setabu	Ada
Tulin Onsoi	Jl. Mundu, Desa Sanur	Ada
Lumbis	Desa Mansalong	Ada
Krayan	Jl. Korpri, Desa Long Bawang	Tidak Ada
Sembakun	Desa Atap RT. 03	Ada
Kabupaten Bulungan		
Tanjung Selor	Jl. Gelatik Pertanian RT 42 RW 15 Kel.Tanjung Selor Hilir	Ada
Tanjung Palas Utara	Jl. Melati, Desa Karang Agung	Ada
Tanjung Palas Tengah	Ds. Salimbatu	Ada
Tanjung Palas Timur	Desa Sajau Hilir Jl. Rice Estate	Ada
Tanjung Palas	Jln. M.Thayib Kel. Tanjung Palas Hilir	Tidak Ada
Tanjung Palas Barat	Kecamatan Tanjung Palas Barat	Tidak Ada
Sekatak	Jl. Raya Poros Kaltim, Desa Sekatak Buji	Tidak Ada
Kabupaten Malinau		
Malinau Barat	Desa Kuala Lapang	Ada

Malinau Utara	Jl BBI RT.4 Desa Kaliamok	Ada
Malinau Kota	Jln Teluk Sanggan RT.II Desa Malinau Hulu	Ada
Mentarang	Desa Lidung Kemenci	Ada

Sumber : Data primer diolah, 2019

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIM-SILUHTAN DI PROVINSI KALTARA**

### **Penyusunan Agenda**

Tahapan proses implementasi SIM-Siluhtan diawali dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif oleh PPK dengan Penanggung jawab kegiatan di tingkat kabupaten guna menyusun agenda pertemuan sosialisasi dan sinkronisasi dalam rangka memberikan pelatihan teknis tatakelola input data pada SIM-Siluhtan kepada admin di tingkat BPP, selain itu guna mensosialisasikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan SL dan ATSL.

Dari tahapan sosialisasi yang sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari tingkat provinsi, kabupaten sampai ke kecamatan, dan hampir semua implementor sudah mengetahui dan memahami tentang SIM-Siluhtan yang diintegrasikan pada pelaksanaan PDPP, sehingga mereka bisa mempersiapkan dengan baik apa yang harus dilakukan agar tujuan, target dan sasaran kebijakan dapat dicapai. Sebagaimana pendapat Agustino (2008), bahwa : ”komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”.

Temuan menunjukkan implementasi SIM-Siluhtan pada PDPP di Provinsi Kaltara dapat terlaksana dengan baik walaupun belum optimal karena ada beberapa kendala terutama dalam mengakses aplikasi. hal ini disebabkan karena permasalahan jaringan internet, signal hilang-timbul,spot internet terbatas di beberapa BPP dan juga masih ada kendala listrik.

**Gambar 4**  
Solialisasi Program Dekonsentrasi, 2018



Sumber : Data sekunder, 2018

**Gambar 5**  
Solialisasi Program Dekonsentrasi, 2019



Sumber : Data sekunder, 2019

## Perumusan Kebijakan

Implementasi kebijakan SIM-Siluhtan merupakan transformasi kebijakan dari proses administrasi manual ke proses administrasi berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK), dimana berbagai aktor, organisasi, sarana dan prasarana, sumber daya, prosedur dan proses komunikasi, perangkat teknologi informasi yang bekerja secara berkolaborasi untuk menjalankan kebijakan guna terwujudnya tujuan yang akan dicapai sebagaimana.

Berdasarkan data penelitian tahun 2018 (tabel 4), diketahui bahwa proses tahapan penetapan CPCL membutuhkan waktu yang cukup lama hingga masa penetapan CPCL yaitu selama 174 hari kalender, sedangkan pada tahun 2019 (tabel 5) proses penetapan CPCL membutuhkan waktu selama 111 hari kalender.

Melihat dari kesiapan pelaksanaan ditingkat kabupaten yang bervariasi sesuai surat usulan CPCL Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Malinau) yaitu bulan Juni dan Agustus, maka pelaksanaan kegiatan dilapangan masuk dalam periode musim tanam kedua sehingga tahapan pelaporan pada SIM-Siluhtan tidak dapat dilakukan pelaporan pada tahapan evaluasi hasil capaian indikator kinerja berhubung berakhirnya tahun anggaran pada bulan Desember tahun berjalan.

**Tabel 4.** Panduan Pelaksanaan PDPP Tahun 2018

Uraian
Buku Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi, 2018
Buku Panduan Aplikasi Siluhtan.net
Keputusan Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : K188.44/K.53/2018 tanggal 02 Januari 2018, tentang pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan bendahara pengeluaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2018;
Keputusan Kepala DPKP Provinsi Kaltara Nomor : 16/DPKP-I/APBN-417675/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang pengangkatan PPK;
Keputusan Kepala DPKP Provinsi Kaltara, Nomor : 60/DPKP-VII/APBN-417675/ 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan penerima biaya operasional penyuluh pertanian;
Keputusan Kepala DPKP Provinsi Kaltara, Nomor : 107/DPKP-VII/APBN-417675/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Petugas dan pengelola Administrasi;
Perjanjian Kinerja antara Kepala DPKP Provinsi Kaltara dengan Kepala BPPSDMP Kementan R.I tanggal 29 November 2018;
Keputusan Kepala DPKP Provinsi Kaltara, Nomor:521.12/346/DPKP/APBN417675/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Tim/Petugas Pelaksana Kegiatan dan CPCL;
Surat Permintaan Data CPCL dari Satker 417675 Provinsi Kaltara Nomor : 521.12/199/DPKP-VII tanggal 05 Februari 2018 ;
Surat Usulan CPCL Kabupaten Nunukan, Nomor : 296/DPKP-IV2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Tim/Petugas Pelaksana Kegiatan dan CPCL;
Surat Usulan CPCL Kabupaten Bulungan, Nomor : 520/19/Distan-VI/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Tim/Petugas Pelaksana Kegiatan dan CPCL;

Sumber : Data sekunder, 2018

**Tabel 5.** Panduan Pelaksanaan PDPP Tahun 2019

Uraian
Buku Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi, 2019
Buku Panduan Aplikasi Siluhtan.net
Keputusan Gubernur Kalimantan Utara, Nomor : K188.44/K.109/2019 tanggal 09 Januari 2019, tentang pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dan bendahara pengeluaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2019;
Keputusan Kepala DPKP Provinsi Kaltara Nomor : 64/DPKP-I/PPK-APBN/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang pengangkatan PPK;
Keputusan Kepala DPKP Provinsi Kaltara, Nomor : 156/DPKP-VII/ APBN-417675/ 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan penerima biaya operasional penyuluh pertanian;

Keputusan Kepala DPKP Provinsi Kaltara, Nomor : 191/DPKP-VII/APBN-417675/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Petugas dan pengelola Administrasi;
Perjanjian Kinerja antara Kepala DPKP Provinsi Kaltara dengan Kepala BPPSDMP Kementan R.I tanggal 22 Agustus 2019;
Notulen Rapat CPCL Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Oktober 2018;
Keputusan Kepala DPKP Provinsi Kaltara, Nomor : 222/DPKP/APBN-417675/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Tim/Petugas dan CPCL;
Keputusan Kepala DPKP Kabupaten Nunukan, Nomor : 80 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Tim/Petugas Pelaksana Kegiatan;
Surat Usulan CPCL Kabupaten Bulungan Nomor : 520/283.a/Distan-VI/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019;
Surat Usulan Perubahan CPCL Kabupaten Malinau Nomor : 520/534/ Distan-II tanggal 06 Agustus 2019.

Sumber : Data sekunder, 2019

Dari data penelitian menunjukkan terjadinya ketidak efisienan waktu pada level penetapan SK. CPCL yang menyebabkan pelaksanaan program dekonsentrasi dilapangan yang semestinya dilaksanakan menyesuaikan dengan masa waktu musim taman yang terdiri dari dua periode yaitu (periode bulan Oktober sampai bulan Maret, dan periode bulan April sampai september) serta iklim, komoditas dan berbagai aspek teknis lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Andrew Dunsire (1978) dalam Wahab (2008) yang mengemukakan istilah *implementation gap* yang menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) dengan oleh para pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

## Implementasi Kebijakan

Data penelitian (tabel 6) diketahui para implementor telah memiliki sarana dan prasarana pelaporan yang memadai, meskipun masih ada implementor yang menggunakan peralatan laptop pribadi.

**Tabel 6.** Perangkat kerja dan Akses Komunikasi Implementor SIM-Siluhtan

Imple-mentor	Peralatan Kerja	Akses Internet
Implementor Kabupaten Bulungan :		
Admin Kabupaten	Komputer PC, Labtop, Handphone	Wifi, Pulsa data
BPP Tanjung Palas Utara	Desktop komputer, Labtop, Handphone	Paket data
BPP Tanjung Palas Timur	Desktop komputer, Labtop, Handphone	Pulsa data
BPP Tanjung Palas	Labtop, Handphone	Pulsa data
BPP Tanjung Palas Tengah	Labtop, Handphone	Pulsa data
BPP Tanjung Selor	Labtop, Handphone	Pulsa data
BPP Sekatak	Labtop, Handphone	-
BPP Tanjung Palas Barat	Handphone	-
Implementor Kabupaten Nunukan :		
Admin Kabupaten	Komputer PC, Labtop, Handphone	Wifi, Pulsa data
BPP Sebatik	Komputer PC, Labtop, Handphone	Pulsa data
BPP Krayan	Desktop komputer	Pulsa data
BPP Nunukan	Komputer PC, Desktop komputer, Handphone	Wifi, Pulsa data
BPP Nunukan Selatan	Labtop, Handphone	Pulsa data
BPP Sebatik Barat	Komputer PC, Labtop, Handphone	Pulsa data
BPP Sebuku	Labtop, Handphone	Pulsa data
BPP Sembakung	Labtop, Handphone	Pulsa data

BPP Sei Menggaris	Labtop, Handphone	Pulsa data
BPP Lumbis	Komputer PC, Labtop, Handphone	Pulsa data
BPP Tulin Onsoi	Komputer PC, Labtop, Handphone	Pulsa data
Implementor Kabupaten Malinau		
Admin Kabupaten Malinau	Komputer PC, Labtop, Handphone	Wifi, Pulsa data
BPP Malinau Kota	Desktop komputer, Handphone	Pulsa data
BPP Malinau Utara	Desktop komputer, Handphone	Pulsa data
BPP Malinau Barat	Labtop, Handphone	Pulsa data
BPP Mentarang	Desktop komputer, Handphone	Pulsa data

Sumber : Data primer, 2019

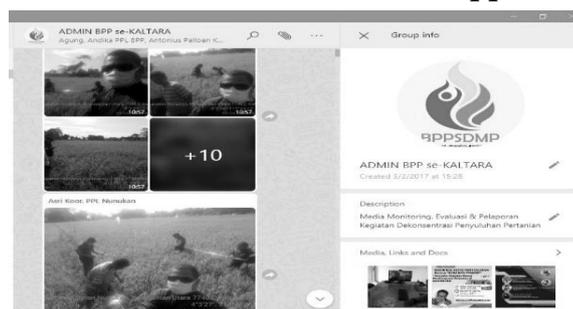
Laporan akumulasi realisasi keuangan pada aplikasi SIM-Siluhtan menunjukkan data akumulasi realisasi keuangan bersifat dinamis dalam tahun anggaran berjalan yang dilaporkan secara bulanan, dimana pada beberapa periode pelaporan dapat diketahui tingkat prestasi capaian realisasi keuangan secara nasional dan Satker Provinsi Kaltara sempat tercatat masuk dalam peringkat lima besar serapan anggaran pada tahun 2018 dan 2019 secara nasional, dan juga seluruh stakeholder terkait telah dapat melihat perkembangan informasi dan gambaran perkembangan pelaksanaan PDPP di Provinsi Kaltara.

Dari aspek serapan anggaran yang berhubungan langsung dengan capaian pelaksanaan fisik kegiatan di level BPP yang dibuktikan dengan foto kegiatan yang dipublikasikan melalui media *facebook*, menunjukkan kinerja serapan anggaran di level pelaksana kegiatan di tingkat BPP yaitu berbanding lurus. Realisasi anggaran pada aplikasi SIM-Siluhtan dapat termonitor secara transparan dan akuntabel yang didukung dengan kinerja para pelaksana kegiatan PDPP secara maksimal dan dengan komunikasi yang intensif sehingga implementasi SIM-Siluhtan dapat dikatakan berhasil mencapai target IKU yang ditetapkan.

Dalam implementasi kebijakan SIM-Siluhtan di lingkup birokrasi dengan rentang kendali yang panjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan BPP, maka diperlukan batasan kewenangan masing-masing. Hasil penelitian (tabel 5 dan 6), menunjukkan peran pengambilan keputusan disetiap level sudah berjalan dengan baik, meskipun dengan kecepatan respon yang berbeda-beda terhadap suatu keputusan yang diterbitkan pada setiap level. Hal ini sejalan dengan pendapat Wilkinson (2004), bahwa sistem informasi merupakan suatu kerangka kerja di mana sumber daya manusia (manusia dan komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Sistem informasi dapat digolongkan berdasarkan beberapa cara, misalnya berdasarkan tingkatannya, berdasarkan kegunaannya, berdasarkan prosesnya dan sebagainya.

Data yang diperoleh melalui kuisisioner, didapatkan gambaran yaitu para implementor telah memiliki sumber daya yang memadai dengan memiliki *handphone* berbasis aplikasi android sehingga tidak ada kendala dalam berkomunikasi melalui aplikasi WA dan dengan rutin memantau dan melaporkan setiap perkembangan dan informasi yang disampaikan melalui group "Admin BPP se-Kaltara" sehingga dengan adanya grup WA yang turut berperan penting dalam memintas rantai komunikasi dan koordinasi secara intensif.

**Gambar 6**  
Media Komunikasi *WhatsApp*

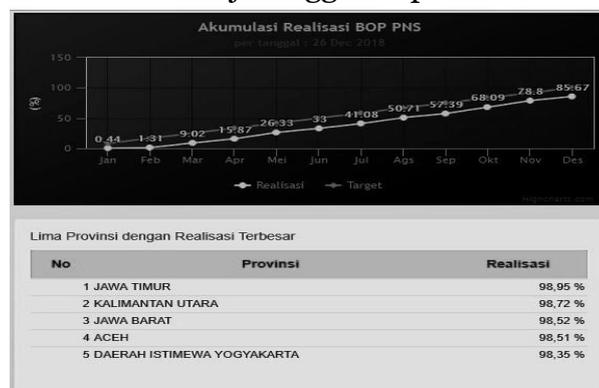


Sumber : Data sekunder, 2019

Dalam rangka transparansi kebijakan publik, peran publikasi kegiatan melalui media *facebook* yang dimiliki oleh BPP, memberikan pengaruh yang positif dalam pelaksanaan PDPP di Provinsi Kaltara yang mana melalui publikasi *facebook* selain membangkitkan semangat para stakeholder terkait, serta sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan dilapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Riant Nugroho (2008), bahwa : model formal proses kebijakan adalah dari “gagasan kebijakan”, “formalisasi dan legalisasi kebijakan”, “implementasi”, dan baru kemudian menuju pada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan yang diperoleh setelah melakukan evaluasi kinerja kebijakan.

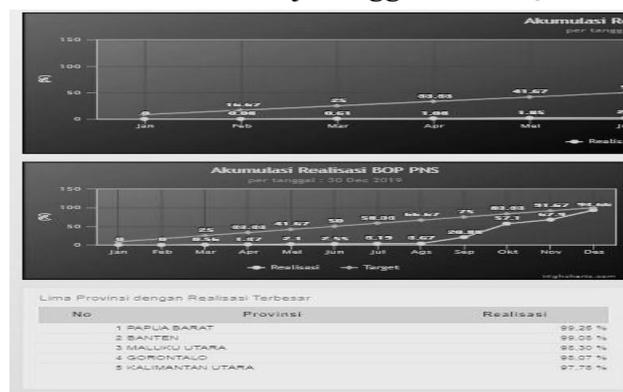
Sebagai media administrasi digital, SIM-Siluhtan juga berperan sebagai media evaluasi dan monitoring. Progres capaian realisasi anggaran satker dekonsentrasi Provinsi Kaltara yang dilaporkan pada periode tanggal 13 desember 2018, berhasil mencapai peringkat kedua realisasi serapan anggaran terbesar tingkat nasional (gambar 7), sedangkan pada tahun anggaran 2019 pada periode yang sama per tanggal 30 desember 2019 berhasil mencapai peringkat lima besar serapan anggaran tertinggi nasional (gambar 8).

**Gambar 7.** Halaman Realisasi Kinerja Anggaran per 26 Desember, 2018



Sumber : Aplikasi SIM\_Siluhtan, 2018

**Gambar 8.** Halaman Realisasi Kinerja Anggaran Per 30 Desember, 2019



Sumber : Aplikasi SIM\_Siluhtan, 2019

Data hasil pelaporan pada SIM-Siluhtan tahun 2018 dan 2019 (gambar 7 dan 8), menunjukkan pelaporan kegiatan SL dan ATSL pada tahap persiapan CPCL hingga pelaksanaan kegiatan dilapangan telah dilaporkan dengan baik, meskipun pelaporan capaian akhir kegiatan belum dilaporkan dikarenakan hal teknis pada jadwal pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal ini membuktikan sikap para implementor di kabupaten Bulungan dan Nunukan yang sangat mendukung implementasi SIM-Siluhtan dalam pembangunan pertanian di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan hasil kuisioner yang menyimpulkan para implementor sudah melaporkan pelaksanaan kegiatan pada SIM-Siluhtan.

Dengan adanya PDPP melalui kegiatan SL dan ATSL yang diintegrasikan pada SIM-Siluhtan, telah banyak memberikan dorongan positif kepada para implementor di tingkat BPP

untuk mulai memperbaiki kinerjanya serta pengelolaan data dan informasi di level BPP yang mulai tertata dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza Handika (2017), bahwa: “Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada variabel kuantitas kerja dan ketepatan waktu sebelum dan sesudah penerapan e-Government, sedangkan pada variabel kualitas kerja tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Namun dengan metode pengukuran menggunakan Wilk’s Lambda di dapatkan hasil bahwa telah terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja pegawai sebelum penerapan e-Government dengan kinerja pegawai sesudah penerapan e-Government di BPKAD Kabupaten Tanggamus”.

## Kontrol dan Evaluasi Kebijakan

Dari aspek pengoperasian aplikasi SIM-Siluhtan yang telah disosialisasikan kepada para implementor berdasarkan hasil kuisisioner, tergolong mudah dalam penggunaannya dan mengolah data menggunakan program *microsoft office* yang sudah dipahami oleh para implementor. Dengan model input data secara manual kedalam *file excel* tanpa perlu koneksi internet dan setelah pengisian selesai maka file sudah bisa diunggah kedalam aplikasi dengan jaringan internet. Hal ini sejalan dengan pendapat DeLone dan McLean (1992), bahwa “Keberhasilan teknologi informasi dipengaruhi oleh faktor-faktor : pribadi pemakai, kualitas sistem dan informasi, kegunaan, kepuasan pemakai serta pengaruh organisasi”.

Keberhasilan suatu proses komunikasi kebijakan yang melibatkan level pusat, provinsi, kabupaten, dan BPP merupakan suatu rentang kendali yang panjang yang mana pada setiap tingkatan akan memerlukan evaluasi dan validasi sebagai bentuk pertanggung jawaban. Guna memintas rantai komunikasi agar setiap informasi-informasi terkini dapat langsung diketahui oleh seluruh level, maka melalui media group komunikasi WA “Admin BPP Se-Kaltara” dapat dilakukan kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilapangan serta pemantauan secara terus-menerus dan langsung dibahas dan mencari solusi bersama melalui grup *chatt WA* maupun *chatt* personal dengan para petugas pada setiap perkembangan tahap demi tahap dalam pelaksanaan kegiatan beserta persoalan yang timbul. Dengan memadukan unsur komunikasi melalui grup media WA dan publikasi kegiatan melalui media sosial *facebook*, juga turut berdampak signifikan pada tercapainya IKU PDPP yang berkualitas dan memberi manfaat secara langsung yaitu meningkatnya pengetahuan para PPL dan Kelompok Tani dalam melakukan usaha pertanian yang lebih terarah melalui program dekonsentrasi”.

Rentang organisasi pelaksana PDPP menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab secara berjenjang, oleh karena itu membutuhkan koordinasi yang berjenjang pula. Setidaknya dengan rantai birokrasi ini akan berpengaruh pada jumlah waktu yang diperlukan hingga implementasi kebijakan dapat diketahui dan dilaksanakan di level BPP, sehingga terjadi ketidak efisiensi waktu yang dikarenakan oleh rantai birokrasi yang berjenjang sehingga jangka waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan terdistorsi, selain itu kurangnya personil PPL, serta padatnya jadwal dan tugas yang ada.

Hal ini sejalan dengan pendapat Edwards III dalam Widodo, (2010) yaitu : “Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan”. Selanjutnya dikatakan dalam Budi Winarno (2005), bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Selanjutnya dikatakan bahwa Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar-red) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk intruksi terdistorsi sangat besar.

## Simpulan

Secara umum Implementasi kebijakan SIM-Siluhtan di Provinsi Kaltara berhasil mencapai target IKU program dekonsentrasi, meskipun belum optimal karena kendala teknis di lapangan. Proses implementasinya yang melibatkan level provinsi, kabupaten, dan BPP dengan rentang kendali yang panjang, memerlukan pendekatan melalui sosialisasi, koordinasi dan

komunikasi yang intensif dan didukung oleh kemampuan SDM personal para implementor dalam melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing dalam membangun kolaborasi dan komunikasi serta memanfaatkan media komunikasi pendukung seperti *Facebook* dan *WhatsApp* dan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

Transparansi dalam proses implementasi kebijakan yang dilakukan dengan strategi publikasi melalui media sosial (*facebook*), memberikan pengaruh signifikan dalam pelaksanaan PDPP dan berdampak pada pelaksanaan kegiatan dilapangan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kemudahan dalam pengoperasian aplikasi ini yang memadukan metode input data secara *offline* dengan *Microsoft Office* sangat sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi Kaltara yang masih mengalami kendala teknis di lapangan.

Rentang kendali struktur birokrasi yang panjang belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas sumber daya yang ada di level provinsi, kabupaten, dan BPP dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda serta daya jangkau wilayah binaan PPL dan kendala medan serta keterbatasan personil PPL, dan juga jenis komoditas sehingga menimbulkan ketidak-efisienan yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pada aplikasi SIM-Siluhtan, keterlambatan pencairan anggaran, serta tahapan evaluasi yang melampaui batas akhir pertanggung jawaban tahun anggaran.

Dengan diimplementasikannya kebijakan SIM-Siluhtan di Provinsi Kaltara telah berdampak pada perbaikan kinerja petugas PPL menuju manajerial berbasis digital, dan juga terjadi efisiensi dan efektifitas para petugas PPL dalam melakukan pendampingan Poktan di wilayah binaannya sehingga meningkatkan semangat dan kinerja para petani dalam meningkatkan produktifitasnya. Selain itu, aplikasi ini berperan sebagai pemintas rantai komunikasi dan koordinasi serta pengurai dan pemecah kebuntuan komunikasi dan persoalan yang timbul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- DeLone, W.H dan McLean, E.R. (1992). *Information System Success : The Quest for the Dependent Variable*. *Information System Research*. (3:1). Pp. 60-95.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hayat. (2014). *Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. *Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*. Volume 8, Nomor 1 Juni, lhm 31-44.
- Hayat, dkk. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Mamud, Bustani Dj. (1995). *Studying Public Policy*. Oxford University Press. Toronto, New York.
- Harsono, Djati. (2009). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (simtanas) di Kantor Pertanahan Jepara*. Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro : UNDIP
- M. Fakhri Husein dan Amin Wibowo. (1999). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : UPP AMP YPKN.
- Handika, R. (2018, 04 Januari). *Kinerja Pegawai Sebelum Dan Sesudah Berbasis e-Government (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah KabupatenTanggamus)*. Tugas Akhir Program Magister, Pascasarjana magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung. Diunduh 01 Juni 2019, dari situs (<http://digilib.unila.ac.id/29693/>)
- Kurniadi, Denny. (2015). *Pengembangan Sistem Informasi Rencana Kerja Dan Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Berbasis Web*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*. Vol. 8 (1).
- Nugroho, Riant. (2009). *Public policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Prehallindo

Rosallinda, Atikah. (2017). *Analisis Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sebelum dan Setelah Penerapan Aplikasi E-Mpa Pada Satker Kementerian Agama Di Seluruh Provinsi Lampung*. Tesis. Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Lampung. Diunduh 01 Juni 2019, dari situs ([http://repository.lppm.unila.ac.id/view/creators/Rosalinda=3A Atikah= 3A=3A.html](http://repository.lppm.unila.ac.id/view/creators/Rosalinda=3A%20Atikah=3A%203A.html))

Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, Wing Wahyu. (2004). *Sistem Informasi Manajemen*. UPP AMP YPKN. Yogyakarta.

Winarno, Budi, (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

Peraturan - Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.07/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor Nomor 16/Permentan/OT.140/2/ 2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementan R.I.